





(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

: PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN **LEMBAGA**

UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROBY KURNIAWAN

2. Jabatan BUPATI

3. NHK 752369

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

4.985.900.000

Tanah dan Bangunan Seluas 1725 m2/1725 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/116 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 2.935.900.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 185 m2/238 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

995.000.000

MOBIL, VELLFIRE 2,5 G AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

995.000.000

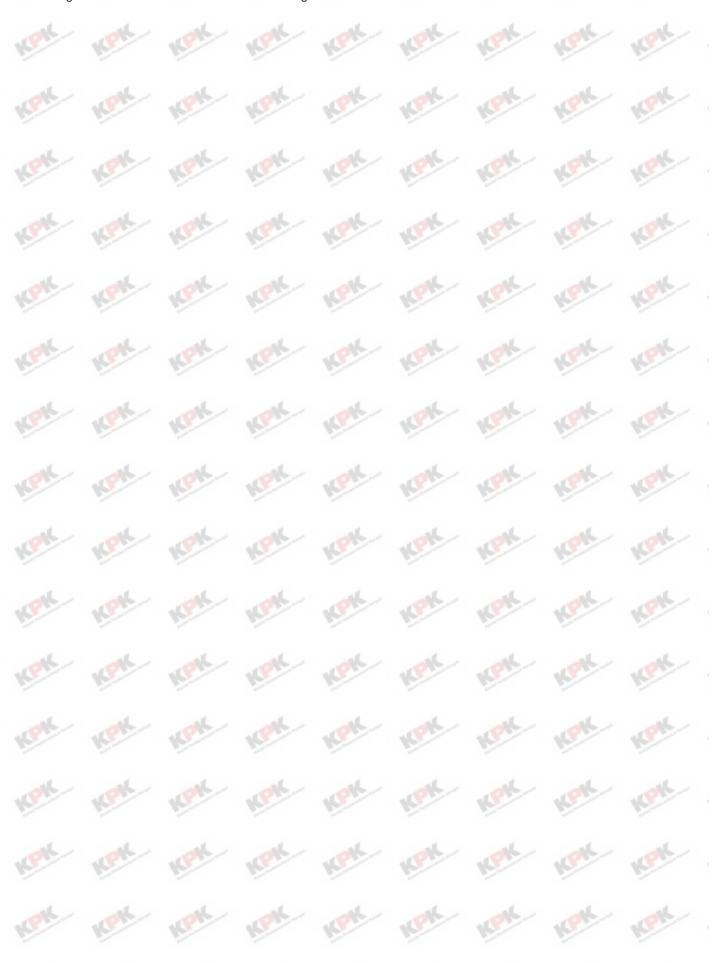
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA			Rp.	
D.	SURAT BERHARGA	al.	al.	Rp.	al III
E.	KAS DAN SETARA KAS	Kar	Kar	Rp.	77.562.235
F.	HARTA LAINNYA			Rp.	178.000.000
PI	Sub Total	KPIK	KPIK	Rp.	6.236.462. <mark>2</mark> 35
III. HU	TANG			Rp.	
IV. TO	TAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	OK-	OK-	Rp.	6.236.462.235

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-





Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.







(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RONNY KARTIKA

2. Jabatan : KEPALA

3. NHK : 518690

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 450.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 556 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA

TANJUNG PINANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp.

35.000.000

3. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HIBAH DENGAN

AKTA Rp. 15.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 200.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

200,000,000

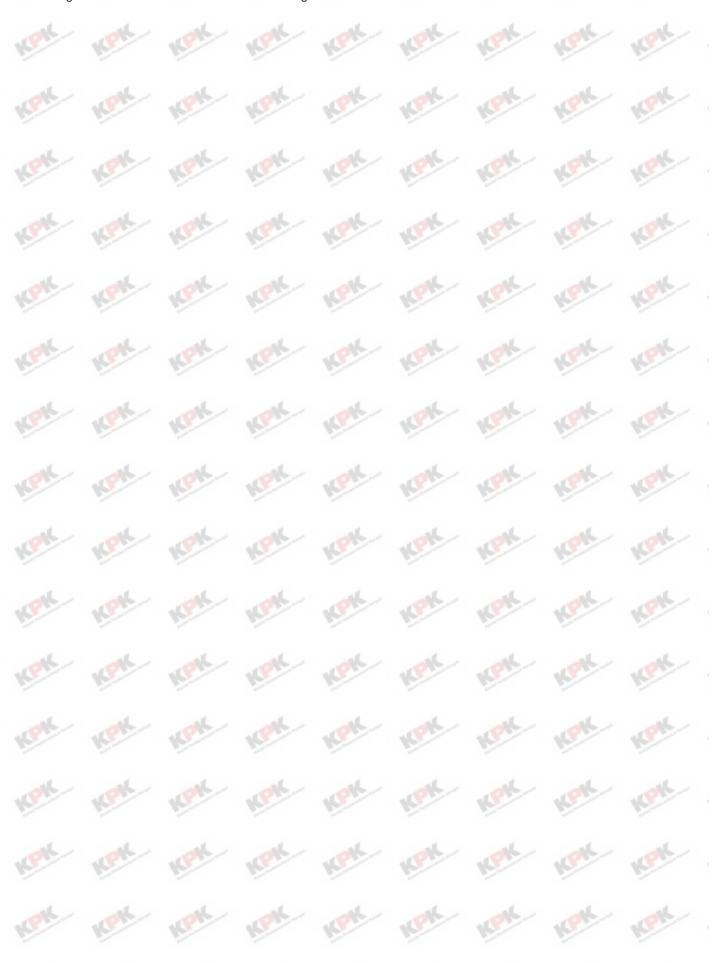
C. HARTA BERGERAK LAINNYA			Rp.	14.000.000
D. SURAT BERHARGA	al.	al.	Rp.	ah ah
E. KAS DAN SETARA KAS	KAR	Kar	Rp.	5.000.000
F. HARTA LAINNYA			Rp.	
Sub Total	KPK	KPIK	Rp.	669.000.000
III. HUTANG			Rp.	193.736.802
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	- N	01	Rp.	475.263.198

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-





Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.







(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HATRIAH

2. Jabatan : KEPALA BADAN

3. NHK : 87094

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 460.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 582 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA

TANJUNG PINANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 408 m2/148 m2 di KAB / KOTA KOTA

TANJUNG PINANG, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000

3. Tanah Seluas 409 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG,

HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 2.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2000, HASIL SENDIRI

Rp. 2.000.000

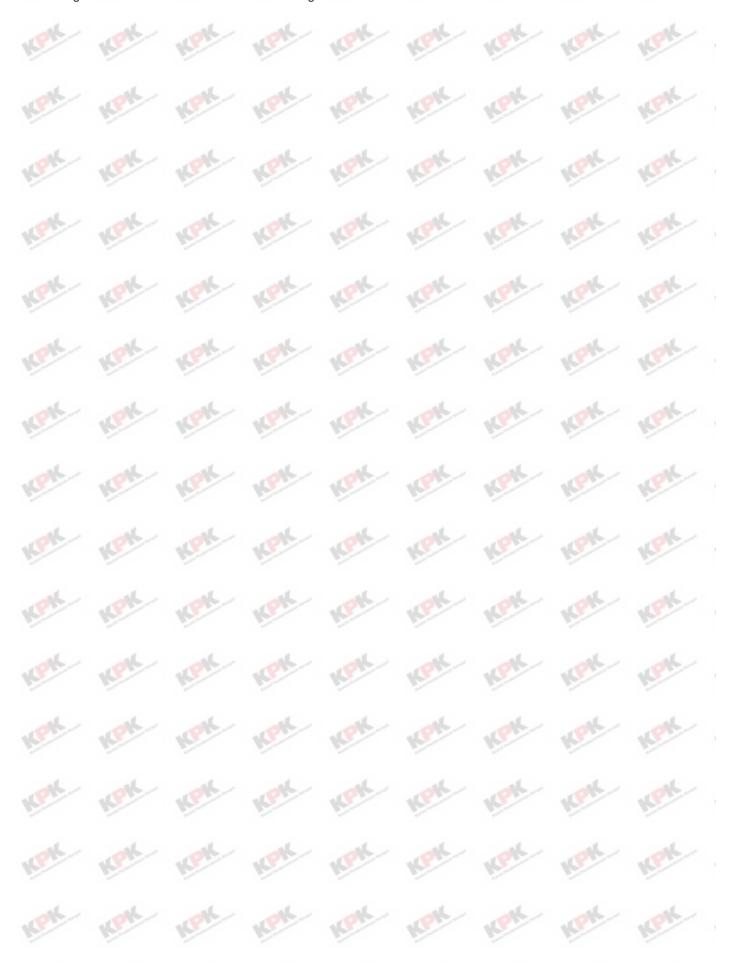
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA			Rp.	44.500.000
D.	SURAT BERHARGA	al.	al.	Rp.	al III
E.	KAS DAN SETARA KAS	KAR	Korn	Rp.	416.288.799
F.	HARTA LAINNYA			Rp.	
PI	Sub Total	KPK	KPIK	Rp.	922.788. <mark>7</mark> 99
III. HU	TANG			Rp.	10.983.200
IV. TO	TAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	- N	01	Rp.	911.805.599

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-





Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.







(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

: PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN **LEMBAGA**

UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : II SANTO

: KEPALA DINAS 2. Jabatan

3. NHK : 96040

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN 1.320.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 246 m2/75 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 820.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 897 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA

TANJUNG PINANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN 233.000.000

MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

MOBIL, HONDA PENUMPANG Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

223,000,000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA			Rp.	72.500.000
D.	SURAT BERHARGA	al.	al.	Rp.	4
E.	KAS DAN SETARA KAS	War	Kar	Rp.	206.450.261
F.	HARTA LAINNYA			Rp.	
314	Sub Total	KPK	KPIK	Rp.	1.831.950. <mark>2</mark> 61
III. HU	TANG	-		Rp.	
IV. TO	TAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	016	016	Rp.	1.831.950.261

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-





Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

KOK	KOK				KOK	KOK	KOK	MON
								KPK
								KPK
								KOK
								KOK
								KOK
								KOK
KPK	KPK							KOK
KOK	KPK	KOK						
				KOK				
KPK	KPK	KPK	KOK	KOK	KPK	KPK	KPK	KPK





(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASY SYUKRI

2. Jabatan : **KEPALA DINAS**

3. NHK : **244917**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.349.150.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 983 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
 TANJUNG PINANG , WARISAN Rp. 555.500.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
- 4. Tanah Seluas 414 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 28.500.000
- 5. Tanah Seluas 5207.55 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 82.000.000
- 6. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
 TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
- 7. Tanah Seluas 1020 m2 di KAB / KOTA KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 21.150.000
- Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG ,
 HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000
- Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
 TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

76.800.000





MOBIL, SUZUKI MINI BUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp
D. SURAT BERHARGA	Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp. 21.424.493
F. HARTA LAINNYA	Rp. Ok
Sub Total	Rp. 1.447.374.493
III. HUTANG	Rp. 807.434.883
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp. 639.939.610

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.







(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

: PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN LEMBAGA

UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAN AFFANDI 2. Jabatan : KEPALA DINAS

3. NHK : 248787

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN 1.128.000.000

Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp.

82.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 272 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG, WARISAN Rp. 482.000.000

3. Tanah Seluas 820 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

Tanah Seluas 328 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 132.000.000

Tanah Seluas 332 m2 di KAB / KOTA BINTAN, WARISAN Rp.

Tanah Seluas 545 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG, WARISAN Rp. 215.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN 120.000.000 Rp.

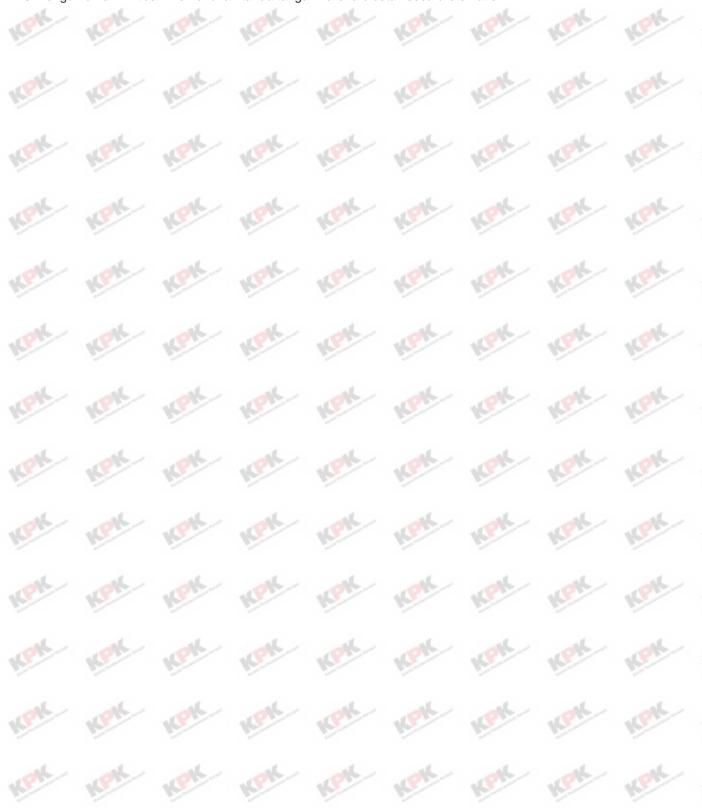
MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	3.500.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	W
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	13.158.468
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	Ph. KEI
	Sub Total	Rp.	1.264.658.468
III. HU	TANG	Rp.	OK VOIL
IV. TO	TAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.264.658.468





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.









(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

: PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN **LEMBAGA**

UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

: RAMLAH 1. Nama

: KEPALA PELAKSANA BADAN 2. Jabatan

NHK 258189

II. DATA HARTA

A.	TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	CAT ICA
В.	ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	♥ Rp.	93.000.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	
OKE.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	34.364.394
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	4.200.000
all.	Sub Total	Rp.	131.564.394
III. HU	TANG	Rp.	357.704.460
IV. TO	TAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-226.140.066

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAMSUL

2. Jabatan : **KEPALA DINAS**

3. NHK : **258192**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 6.788.800.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA
 TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 319.800.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 835 m2/835 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/198 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
- 4. Tanah dan Bangunan Seluas 10000 m2/10000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
- 5. Tanah dan Bangunan Seluas 7000 m2/7000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
- 6. Tanah dan Bangunan Seluas 5000 m2/5000 m2 di KAB / KOTA
 BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 4000 m2/4000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/1000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/600 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 10000 m2/10000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
- 11. Tanah dan Bangunan Seluas 1400 m2/1400 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
- 12. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/2000 m2 di KAB / KOTA





BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 5000 m2/5000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
- 14. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/20000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 240.000.000
- 15. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/20000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 240.000.000
- 16. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/20000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 240.000.000
- 17. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/20000 m2 di KAB / KOTA

 BINTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 240.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/20000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 24.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/20000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 240.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/20000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 240.000.000
- 21. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/20000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 240.000.000
- 22. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/20000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 240.000.000
- 23. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/20000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 240.000.000
- 24. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/20000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 240.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/20000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 240.000.000
- 26. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/20000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 240.000.000
- 27. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/20000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 240.000.000
- 28. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/20000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 240.000.000
- 29. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/20000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 240.000.000







- Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/20000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 240.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/20000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 240.000.000
- 32. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/20000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 240.000.000
- 33. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/20000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 240.000.000
- 34. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/20000 m2 di KAB / KOTA KOTA BINTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 240.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

12.000.000

- MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
- MOTOR, YAMAHA FINO MATIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	8.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	198.914.684
F. HARTA LAINNYA	Rp.	
Sub Total	Rp.	7.007.714.684
III. HUTANG	Rp.	200.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.807.714.684

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

142.000.000





PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

Nama : RIANG ANGGRAINI
 Jabatan : SEKRETARIS DPRD

3. NHK : **273792**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 617.000.000

Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp.
 20.000.000

 Tanah Seluas 630 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

 Tanah Seluas 19382 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

4. Tanah Seluas 4000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

5. Tanah Seluas 5200 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 82.000.000

6. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

 MOTOR, KAWASAKI 150 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

MOBIL, TOYOTA RUSH (BARU LUNAS DESEMBER 2020) S
 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 79.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 63.714.000





F. HARTA LAINNYA	Rp.	OK OH
Sub Total	Rp.	901.714.000
III. HUTANG	Rp.	210.641.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	691.073.000

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <u>elhkpn.kpk.go.id</u>. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

190.800.000

Rp.





PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NAFRIYON

2. Jabatan : **KEPALA DINAS**

3. NHK : 432787

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.852.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 166 m2/155 m2 di KAB / KOTA KOTA
 TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI

Rp. 152.000.000

Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI
 Rp. 235.000.000

4. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 102.000.000

5. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

6. Tanah Seluas 7542 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 248.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

 MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 184.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 106.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.158.800.000



III. HUTANG Rp. ---IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.158.800.000

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUWARSONO

2. Jabatan : **KEPALA SATUAN**

3. NHK : **514520**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.500.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/106 m2 di KAB / KOTA KOTA
 TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA

TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/108 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

4. Tanah Seluas 15000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 312.000.000

 MOTOR, YAMAHA 2DP NON ABS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

2. MOBIL, H<mark>ON</mark>DA HRV Tahun 2019, HASIL <mark>S</mark>ENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	52.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	234.363.859
F. HARTA LAINNYA	Rp.	K
Sub Total	Rp.	3.098.863.859
III. HUTANG	Rp.	146.333.333
V. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.952.530.526

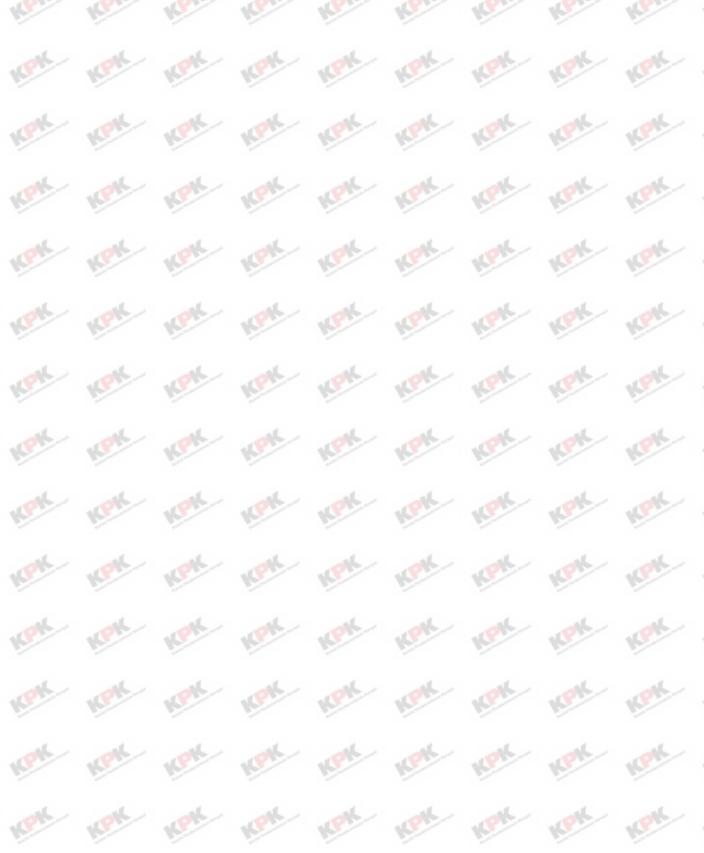
^{1.} Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <u>elhkpn.kpk.go.id.</u> Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan





dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.









(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

: ARIEF SUMARSONO 1. Nama

2. Jabatan : KEPALA DINAS

3. NHK 655090

II. DATA HARTA

650.000.000 A. TANAH DAN BANGUNAN

Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/117 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN 391.500.000 Rp.

MOTOR, YAMAHA XEON Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

MOBIL, HONDA FREED Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.

130.000.000

MOTOR, YAMAHA FINO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

6.500,000

MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI

250.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA			Rp.	123.000.000
D.	SURAT BERHARGA			Rp.	
E.	KAS DAN SETARA KAS	KPK	KPK	Rp.	126.331. <mark>7</mark> 33
F.	HARTA LAINNYA			Rp.	
OK-	Sub Total	· No.	OK	Rp.	1.290.831.733
III. HU	TANG			Rp.	276.313.884
IV. TO	TAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	al.	al.	Rp.	1.014.517.849

^{1.} Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara







- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

